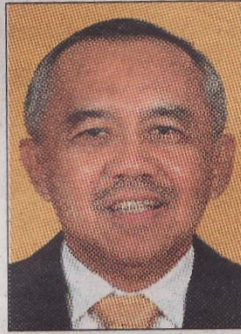




Pengadaan Mobil Dinas Harus Sesuai Aturan

PEKANBARU (RP) - Mekanisme pengadaan lelang mobil dinas yang dilaksanakan Biro Perlengkapan Setdaprov Riau masih berjalan. Terkait kepatutan anggaran besar yang disedot dari APBD Riau, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman diharapkan terlaksana sesuai aturan.



ARSYADJULIANDI RACHMAN

Demikian diungkapkan Plt Gu-

bri ketika disinggung mengenai hiruk-pikuk pengadaan mobil dinas yang menghabiskan anggaran sampai Rp70 miliar, baik untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau maupun bagi anggota dewan.

“Yang jelas untuk pengadaan mobil dinas itu semuanya harus berjalan

■ Baca *Pengadaan* Halaman 32

Pengadaan Mobil Dinas Harus Sesuai Aturan

Sambungan dari hal. 21

sesuai dengan aturan. Silahkan tanya Biro Perlengkapan penerapannya,” ujarnya.

Selain itu Plt Gubri juga mengharapkan tahapan-tahapan yang dijalankan dalam pengadaan mobil dinas tersebut juga mengikuti prosedur sesuai mekanisme pengadaan lelang. Sehingga dalam penggunaannya nanti tidak terjadi kendala-kendala atau permasalahan di kemudian hari. “Ikuti semua mekanisme, agar tidak tersandung masalah,” harapnya.

Diketahui hingga memasuki triwulan IV semester II tahun anggaran 2014 ini seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Riau tidak lagi menggunakan mobil dinas. Karena kendaraan roda empat yang digunakan sebelumnya sudah berakhir kontraknya.

Demikian pula anggota DPRD Riau periode 2014-2019 sejak dilantik juga belum mendapatkan kendaraan operasional kerja. Pemprov Riau kini tengah melakukan tahapan lelang sebagai langkah pengadaan dengan sistem pembelian, bukan lagi sewa seperti sebelumnya. (egp)